

Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Meningkatkan Hilirisasi Industri Nikel Pasca Larangan Ekspor Bijih Nikel (2020-2024)

Tantri Maria Anindita

Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Indonesia
tantrimaria07@gmail.com

Triesanto Romulo Simanjuntak

Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Indonesia
triesanto.simanjuntak@uksw.edu

Roberto Octavianus Cornelis Seba

Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Indonesia
robert.seba@uksw.edu

Abstract

This study describes Indonesia's economic diplomacy strategy for promoting the nickel industry downstream following the implementation of the nickel ore export ban policy in 2020. The author will review Indonesia's economic diplomacy efforts or strategies in promoting the nickel industry downstream following the 2020 nickel ore export ban using the concepts of economic diplomacy and dependency theory. The author employs a qualitative approach through a literature review. This study found that Indonesia's economic diplomacy employs a combination of bilateral and multilateral approaches, including establishing cooperation with key partners such as China and South Korea. This diplomacy is carried out to maintain the downstream policy and attract foreign investment to develop the nickel processing sector. Despite facing challenges from the European Union through the WTO, Indonesia remains determined to maintain this policy aiming to create domestic added value and reducing dependence on raw material exports. These findings demonstrate how economic diplomacy serves as an effective instrument in achieving Indonesia's national interests.

Keywords: Economic Diplomacy; Nickel Downstreaming; Dependency; National Interest

Abstrak

Penelitian ini menjabarkan mengenai strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam meningkatkan hilirisasi industri nikel pasca berlakunya kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2020. Penulis akan meninjau upaya atau strategi diplomasi ekonomi

Article History: Received 4 July 2025, Revised 15 October 2025,
Accepted 31 October 2025, Available online 01 November 2025

Copyright: © 2025. The authors.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Indonesia dalam meningkatkan hilirisasi industri nikel pasca larangan ekspor bijih nikel tahun 2020-2024 menggunakan konsep diplomasi ekonomi dan teori ketergantungan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia menggabungkan pendekatan bilateral dan multilateral, termasuk menjalin kerja sama dengan mitra utama seperti China dan Korea Selatan. Diplomasi ini dilakukan untuk mempertahankan kebijakan hilirisasi dan menarik investasi asing guna mengembangkan sektor pengolahan nikel. Meskipun menghadapi gugatan dari Uni Eropa melalui WTO, Indonesia tetap bertekad mempertahankan kebijakan tersebut dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Temuan ini memperlihatkan bagaimana diplomasi ekonomi menjadi instrument yang efektif dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia.

Keywords: Diplomasi Ekonomi; Hilirisasi Nikel; Ketergantungan; Kepentingan Nasional

Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan aspek krusial dalam masa integrasi ekonomi global. Praktik perdagangan internasional sendiri sudah berlangsung sejak lama. Setiap negara di dunia tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut muncul akibat faktor-faktor seperti letak geografis, ketersediaan sumber daya alam, serta aspek lainnya di tiap-tiap negara. Oleh karena itu, untuk saling melengkapi kekurangan yang ada, negara-negara menjalin kerja sama dalam bentuk perdagangan internasional.

Ekspor merupakan salah satu bentuk dari perdagangan internasional. Ekspor dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan barang keluar dari wilayah pabean¹. Salah satu komoditas ekspor yang berasal dari sumber daya alam Indonesia adalah nikel. Dalam data tahun 2024 dari Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Indonesia memiliki sumber daya nikel sebanyak 17,33 miliar ton dengan cadangan 5,03 miliar ton². Pada tahun 2020, sebagai salah satu penghasil bijih nikel utama, Indonesia telah menerapkan kebijakan hilirisasi terhadap komoditas tersebut. Dimana mulai Januari 2020, pemerintah Indonesia secara resmi telah melakukan pelarangan terhadap ekspor bijih nikel. Upaya hilirisasi sumber daya alam ini merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan visi 'Indonesia Emas 2045'. Melalui Langkah ini, Indonesia secara tegas memiliki target untuk bertransformasi menjadi negara maju³.

Hilirisasi adalah proses mengubah bahan tambang mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan dapat diperdagangkan dengan nilai yang lebih tinggi pula. Bahan baku yang sebelumnya dapat langsung diekspor ke luar negeri, sejak adanya larangan ekspor bijih nikel harus melalui tahap pengolahan di dalam negeri, sebelum akhirnya menjadi produk bernilai

tinggi seperti *stainless steel* atau bahan baku baterai kendaraan listrik. Tujuan utama hilirisasi adalah untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional dengan menciptakan nilai tambah yang signifikan serta meningkatkan pendapatan masyarakat⁴.

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini tentunya menimbulkan berbagai respon negatif di kalangan mitra dagang internasional Indonesia. Salah satunya adalah Uni Eropa, di mana Uni Eropa menyampaikan penolakannya dan bahkan menggugat kebijakan ini melalui World Trade Organization (WTO). Gugatan WTO terhadap Indonesia tersebut tercatat dalam sengketa DS592, mengenai langkah-langkah terkait ekspor bahan mentah⁵. Dalam hal ini, mereka menganggap bahwa kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia telah melanggar prinsip perdagangan bebas internasional yang telah disepakati bersama. Tekanan ini tentunya menjadi tantangan diplomatik yang kompleks bagi Indonesia. Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia untuk mengadopsi pendekatan diplomasi ekonomi untuk mempertahankan kebijakan tersebut.

Diplomasi ekonomi merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk menjalin hubungan ekonomi dengan pihak eksternal melalui keterlibatan aktif negara, yang tidak semata-mata bergantung pada mekanisme pasar demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Rana (2007) berpendapat bahwa diplomasi ekonomi bisa didefinisikan sebagai suatu langkah di mana sebuah negara menyelesaikan masalahnya dengan negara lain, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan negara melalui kegiatan ekonomi maupun pertukaran ekonomi, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Berdasarkan “Grand Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2025)” yang disusun oleh tim LIPI pada 2013, kebijakan luar negeri Indonesia tetap mengedepankan prinsip bebas aktif, dengan fokus pada kepentingan nasional dalam jangka panjang dan menyesuaikan dengan kondisi domestik serta dinamika regional dan global. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, diplomasi ekonomi Indonesia difokuskan pada pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan energi, pembangunan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan dan investasi, serta pengembangan sektor maritim untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia⁶.

Diplomasi ekonomi tentunya menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar-menawarnya di kancah internasional. Melalui diplomasi ekonomi, pemerintah Indonesia dapat menyampaikan alasan strategis dibalik kebijakan hilirisasi serta memberikan penjelasan mengenai manfaat jangka panjang dari adanya kebijakan tersebut. Mengingat adanya tekanan internasional yang

muncul akibat adanya kebijakan larangan ekspor bijih nikel, maka sangat penting untuk menganalisis bagaimana Indonesia menerapkan strategi diplomasi ekonominya. Kajian terhadap diplomasi ekonomi dalam konteks ini menjadi sangat relevan, terutama untuk memahami efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan kebijakan tersebut.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif karena sesuai dengan pernyataan Lawrence W. Neuman bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data dengan memberi makna pada data yang diperoleh. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang lebih fleksibel dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, serta lebih berorientasi pada suatu konteks dengan maksud untuk memberikan gambaran atau pemahaman mengenai suatu hal atau pun kasus⁷. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian pustaka. Data utama yang digunakan dalam penulisan ini adalah dokumen-dokumen yang berupa buku, jurnal, berita atau koran online, dan lain-lain. Penulis menggunakan konsep Diplomasi Ekonomi untuk menganalisis penelitian ini. Selain itu, penulis juga menambahkan teori ketergantungan untuk menganalisis mengenai efektivitas kebijakan hilirisasi nikel.

Hasil dan Pembahasan (Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia)

Menurut Berridge dan James (2001), diplomasi ekonomi dapat dimaknai sebagai proses pemanfaatan instrumen ekonomi oleh suatu negara untuk mencapai tujuan dalam kebijakan luar negerinya. Maaïke Okano-Heijmans mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai pemanfaatan alat-alat ekonomi untuk mendukung stabilitas politik dalam negeri, sekaligus penggunaan perangkat politik dalam negosiasi internasional demi mendorong kemajuan ekonomi nasional. Di sisi lain, Scholte (2000) menggarisbawahi bahwa peran utama dari diplomasi ekonomi terletak pada penyediaan informasi terkait peluang investasi dan ekspor, serta menjembatani relasi antara pelaku usaha domestik dan mitra asing. Pada umumnya, diplomasi dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri beserta jajaran perwakilan diplomatik. Namun, dalam praktik diplomasi ekonomi, cakupan aktor yang terlibat menjadi jauh lebih luas. Poonam Barua (2006) mengemukakan bahwa diplomasi ekonomi kini berada dalam ruang ekonomi baru, yang mencakup aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga riset, serta *Multinational Corporation* (MNC). Dalam pandangannya, keterlibatan elemen-elemen ini menjadi penting dalam proses pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri. Sementara itu, Kishan S. Rana (2013) menegaskan pentingnya peran sektor swasta dalam diskusi-diskusi internasional terkait diplomasi ekonomi. Menurutnya, pelaku bisnis seharusnya dilibatkan langsung dalam dialog antarnegara yang menyangkut kerja sama ekonomi lintas batas. Di mana menurut Kishan S. Rana, sektor swasta adalah elemen penting dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi⁸. Kishan Rana (2013)

menjelaskan tahapan diplomasi ekonomi pada negara berkembang yang terbagi menjadi empat tahapan yaitu *Economic Salesmanship*, *Economic Networking and Advocacy*, *Image Building*, dan *Regulatory Management and Resource Mobilization*⁹.

Economic Salesmanship

Pada tahap *Economic Salesmanship*, aktor yang memainkan peran utama dalam diplomasi ekonomi mencakup presiden, kementerian luar negeri, duta besar, dan diplomat. Dalam tahap ini, negara dapat mengutus pejabat tinggi untuk melakukan diplomasi ekonomi di negara tujuan. *Economic salesmanship* dapat dipahami sebagai usaha untuk mempromosikan produk atau menawarkan penjualan kepada kelompok tertentu. Aktivitas ini bertujuan untuk memperkenalkan produk unggulan domestik dengan memanfaatkan hubungan politik dengan pengambil keputusan. Tahapan ini merupakan langkah pertama yang strategis karena akan membuka peluang adanya investasi dari pihak luar¹⁰. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan ini, lembaga resmi suatu negara akan berperan menjadi *salesperson* yang mempromosikan ekspor atau investasi dengan mengedepankan keunggulan sumber daya dalam negeri.

Pada 12-16 April 2021 telah diadakan pameran teknologi industri terbesar di dunia yang diselenggarakan secara virtual, yaitu Hannover Messe 2021. Hannover Messe merupakan suatu *exhibition* industri tingkat dunia yang diadakan setiap tahun di Hannover, Jerman. Pameran ini mempunyai exposure internasional yang tinggi, seperti yang terjadi pada pameran tahun 2019 lalu, di mana terdapat lebih dari 6.500 eksibitor dari 75 negara di seluruh dunia dan menempati lahan seluas 227.000 meter persegi. Setiap tahunnya, satu negara dipilih untuk berperan menjadi *official partner country*, di antaranya adalah India (2015), Amerika (2016), Polandia (2017), Meksiko (2018), Swedia (2019), dan pada tahun 2021 Indonesia terpilih untuk melakukan peran tersebut. Kehadiran Indonesia dalam acara ini tentunya memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk memperkuat citra nasionalnya sebagai kekuatan ekonomi baru di tingkat global sekaligus aktor penting dalam manufaktur dunia. *Exhibition* ini diadakan secara daring sebagai penyesuaian terhadap situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat itu. Dalam sambutannya, Indonesia mengusung tema “Indonesia Emas: Industri 4.0”, yang di dalamnya membahas mengenai keinginan Indonesia untuk bermitra dengan Jerman mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Selain itu Indonesia juga menyoroti pentingnya investasi dalam pembangunan berkelanjutan, serta mempromosikan kapasitasnya sebagai negara produsen nikel terbesar dua dunia yang tengah mengembangkan teknologi pengolahan bijih nikel menjadi baterai lithium, yang merupakan komponen utama dalam baterai untuk ponsel dan kendaraan listrik¹¹.

Pada 24 Juli 2023 pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Korea mengadakan pertemuan kedua *Joint Committee on Economic Cooperation* (JCEC-2) di Seoul, Korea Selatan. Pertemuan ini bertujuan untuk meninjaklanjuti Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) yang telah efektif sejak Januari 2023. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai prospek kerja sama di bidang kebijakan dan bisnis antara kedua negara, termasuk pengembangan investasi nikel untuk baterai *electric vehicle* (EV), daur ulang baterai EV, motor listrik, panel surya, serta kemudahan perizinan impor. Selain itu terdapat kesepakatan untuk memperluas akses pasar produk Indonesia di Korea Selatan dan meningkatkan bantuan pembangunan untuk sektor infrastruktur EV, teknologi pendeteksi polusi, dan peningkatan kapasitas dalam bidang metrologi¹².

Pada 12-14 Juni 2024 Indonesia turut berpartisipasi dalam acara Global Leaders Forum (GLF) yang diadakan untuk memperingati 60 tahun UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) di kantor PBB, Jenewa. Pada kesempatan tersebut, Kedua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar diundang sebagai perwakilan Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh kepala negara dan pemerintahan dari berbagai negara, termasuk Presiden Swiss, Wakil Presiden Kosta Rika, Perdana Menteri Timor Leste, serta para delegasi dan menteri dari 152 negara. Dalam pidatonya, Mahendra Siregar menekankan pentingnya menemukan kepentingan bersama yang sejati antara negara maju dan negara berkembang, serta urgensi pembangunan berkelanjutan dan penerapan ekonomi hijau. Ia juga membahas perlunya memanfaatkan sumber daya alam dengan meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri hilir, seperti pengolahan kelapa sawit, nikel menjadi baterai, baja, dan lain-lain. Dalam forum ini, OJK juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa investasi hijau memberikan keuntungan yang dapat menarik minat investor serta mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan¹³.

Economic Networking and Advocacy

Negara berkembang lebih sering melakukan kegiatan “promosi dan penjualan” seperti yang ada pada tahapan pertama, Namun dalam tahapan kedua ini, lebih menekankan kontributor diplomasi yang lebih luas. *Economic Networking and Advocacy* tidak hanya dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah, tetapi juga bisa dilakukan oleh badan swasta, *think tank*, individu, maupun mitra lembaga lainnya¹⁴. Dalam tahap ini negara lebih tertuju pada pembentukan hubungan bisnis dan ekonomi, serta melaksanakan kegiatan advokasi untuk memberikan dukungan kepada sektor swasta. Langkah ini dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dengan agenda khusus yang dirancang untuk membangun dan memelihara hubungan jangka panjang.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, aktor dalam kegiatan ini tidak hanya berpacu kepada lembaga resmi saja. Di mana pada 30-31 Mei 2023,

Shanghai Metals Market (SMM) berkolaborasi dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) untuk menyelenggarakan 2023 Indonesia Nickel and Cobalt Industry Chain Conference. Acara ini mengangkat tema “*The New Ecology of Nickel and Cobalt Industry Under Globalization*”. Latar belakang diselenggarakannya acara ini adalah untuk lebih mempromosikan pertukaran wawasan industri nikel dan kobalt di China dan Indonesia, serta membantu memahami situasi industri terkini dan tren perkembangan NEV. Manfaat kegiatan ini juga agar memperkuat relasi antara China dan Indonesia dalam bidang energi. SMM sendiri merupakan perusahaan riset pasar logam China yang didirikan pada 1999. Sementara itu, APNI adalah asosiasi yang mewadahi para aktor pertambangan bijih nikel di sektor hulu. Asosiasi ini dibentuk oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM pada 6 Maret 2017¹⁵.

Peran APNI juga dianggap penting dalam keberhasilan diplomasi ekonomi, di mana APNI juga bertugas untuk mempromosikan produk nikel pada negara lain serta memperkuat hubungan perdagangan antara negara Indonesia dan negara lain melalui acara-acara yang diselenggarakannya. Pada 15-17 Mei 2024 telah diadakan pameran INAPA 2024 dan Transport & Logistics Indonesia 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh PT. Global Expo Management (GEM) Indonesia dan APNI. Acara ini merupakan pameran terlengkap yang menampilkan spektrum penuh produk dan layanan terkait industri otomotif dan transportasi. Beberapa *sub-events* juga digelar, antara lain adalah Inabike 2024, Inafastener 2024, Electric Vehicle 2024, Tire & Rubber Indonesia 2024, Lube Indonesia 2024, Truk & Trailer Indonesia 2024, CON-MINE Indonesia 2024, dan Forklift Indonesia 2024. Pameran ini dihadiri lebih dari 1.350 perusahaan pameran terkemuka dari 21 negara. Menurut Dewan Penasihat Pertambangan APNI Joko Widajatno, inovasi dalam pameran tersebut dikembangkan dengan adanya hilirisasi nikel. Ia juga mengatakan bahwa INAPA 2024, EV Indonesia 2024, dan Transport & Logistic merupakan satu kemajuan, di mana produk-produk yang berbahan dasar nikel mulai diterapkan baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung pembangunan kendaraan listrik¹⁶.

Selain APNI, *National Battery Research Institute* (NBRI) Indonesia juga merupakan aktor diplomasi ekonomi. NBRI sendiri merupakan pusat unggulan inovasi baterai dan energi terbarukan independen di Indonesia. Dalam perannya sebagai aktor diplomasi ekonomi, NBRI secara rutin mengadakan konferensi yang diberi nama *Internasional Battery Summit* (IBS). Acara tersebut rutin diadakan tiap tahun dengan menggandeng berbagai aktor ekonomi lainnya. IBS pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 2023. IBS 2023 diadakan oleh NBRI dengan menggandeng APNI dan Queen Mary University of London. Pada konferensi ini dibahas mengenai beragam isu terkait proyek dan industri baterai dan kendaraan listrik, perkembangan teknologi, hingga kebijakan dan regulasi yang mengaturnya. Acara ini dihadiri oleh 40 pembicara dari 10 negara (Indonesia, Singapura, UK, USA, Australia, Korea Selatan, dan lain-lain¹⁷). Beberapa hal penting yang dapat dipetik

dari IBS 2023 adalah perlunya indeks nikel Indonesia untuk meningkatkan daya saing nikel Indonesia, pentingnya menerapkan praktik pertambangan dan pengelolaan yang baik dalam industri pertambangan agar terciptanya industri pertambangan dan baterai yang lebih berkelanjutan, pentingnya mempersiapkan industri daur ulang baterai, dan lain-lain. Konferensi ini ditutup dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara NBRI dengan PT. Carsurin, serta antara NBRI dan PT. Gesits Bali Pratama. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ini merupakan bentuk komitmen untuk bekerja sama dalam bidang uji baterai, inovasi penelitian dan pengembangan (R&D) teknologi baterai, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Image Building

Pada tahapan ketiga ini, kegiatan perekonomian sebuah negara akan didorong oleh kesadaran akan pentingnya *image* atau citra negaranya karena hal tersebut adalah salah satu aspek penting bagi sebuah negara di kancah internasional. *Image* dari suatu negara akan berpengaruh terhadap berbagai bidang, termasuk aktivitas ekonomi dari negara tersebut. Bagi negara-negara berkembang, tujuan utama *image building* adalah agar mereka mendapatkan perhatian dan diakui oleh negara lain. Dalam hal ini, negara akan berusaha meningkatkan *nation branding* demi memajukan ekonomi dengan salah satunya melakukan koordinasi antara negara dan swasta dalam memasarkan industri negaranya, melalui keikutsertaan dalam acara internasional serta pameran internasional. Citra suatu negara sangat berdampak bagi aktivitas ekonominya, yang mana ketika suatu negara memiliki citra yang baik, maka kerjasama dengan negara lain akan mudah untuk dilakukan¹⁸.

Pada tahapan ini pemerintah Indonesia berhasil untuk memasukkan nikel RI di bursa komoditas logam London Metal Exchange (LME). Di mana nikel olahan dari Indonesia dengan kode “DX-zwdx” ini telah melantai di bursa sejak Mei 2024. Nikel ini diproduksi oleh PT CNGR Ding Xing New Energi yang berlokasi di Morowali. Direktur Public Relations CNGR Indonesia Magdalena Veronika mengungkapkan bahwa setelah nikel Indonesia melantai di MLE, kualitas nikel Indonesia sudah diakui secara global. Terlebih lagi, untuk bisa melantai di LME, “DX-zwdx” membutuhkan proses yang panjang dan harus memenuhi beberapa sertifikasi¹⁹. Dengan keberhasilan Indonesia memasukkan produk nikelnya di LME, maka tentunya Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki kemampuan hebat dalam bidang nikel. Hal tersebut menandakan bahwa Indonesia bukan hanya penghasil bahan mentah, tetapi juga produsen barang olahan yang memiliki standar internasional.

Selain itu keberhasilan dan ketegasan Indonesia dalam mempertahankan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel juga bisa dianggap sebagai salah satu

usaha Indonesia untuk membangun citranya. Di mana ketika Uni Eropa menggugat Indonesia karena kebijakan tersebut, Indonesia masih tetap mempertahankan kebijakan tersebut dan bahkan mengajukan banding. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berjuang untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga merancang strategi jangka panjang untuk menjadi pusat produksi nikel yang lebih berkelanjutan.

Regulatory Management and Resource Mobilization

Pada tahap ketiga ini, negara mulai lebih fokus dalam mengelola regulasi yang dapat mendorong pertumbuhan komersial, salah satunya dengan menandatangani perjanjian dagang. Dalam praktik diplomasi ekonomi, adanya regulasi serta perjanjian dagang yang terstruktur merupakan elemen yang krusial. Kejelasan aturan dalam kegiatan perdagangan tentunya memberikan kemudahan bagi seluruh pihak untuk terlibat secara aktif. Oleh karena itu, negara-negara yang memiliki hubungan kerja sama harus sepakat mengenai regulasi atau perjanjian yang mencakup berbagai sektor, termasuk perdagangan, pendidikan, dan budaya. Dengan adanya kesepakatan regulasi ini, hubungan kerja sama antara negara-negara tersebut akan membawa manfaat yang saling menguntungkan²⁰.

Kerja sama Indonesia dan China sudah dimulai secara resmi pada tahun 1950, sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan masih terus berlanjut hingga masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam mendorong perkembangan industri hilirisasi nikel yang terintegrasi, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan hilirisasi nikel domestik, salah satunya dengan memperbanyak jumlah smelter. Smelter sendiri adalah pabrik yang berfungsi untuk memproses bijih mineral menjadi logam murni atau paduan logam²¹. Namun demikian, pembangunan dan pengembangan smelter menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal biaya. Oleh karena itu, untuk mendorong proses hilirisasi ini pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan China untuk mendukung proyek nikel di Indonesia. Investasi China di sektor smelter Indonesia telah memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi kedua negara ini.

Pada 12 Juli 2023, PT. Mitra Murni Perkasa (MMP), anak perusahaan dari MMS Group Indonesia (MMSGI), menandatangani kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dengan China ENFI untuk mengembangkan proyek smelter nikel matte di Kalimantan Timur. Smelter ini dirancang untuk menghasilkan 27.000 ton produk per tahun dengan kandungan nikel lebih dari 70%. Tujuan utama pembangunan smelter ini adalah untuk mendukung meningkatnya permintaan nikel sebagai bahan baku untuk pembuatan baterai kendaraan listrik²². Pada 11 September 2023, PT. MMP melakukan peletakan batu pertama pembangunan smelter, yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan pemerintah, pendiri MMS Group Indonesia (MMSGI), serta perwakilan dari PT.

PLN (Persero), kontraktor EPC ENFI, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Direktur Utama PT. MMP. Meskipun awalnya diperkirakan proyek ini akan selesai pada kuartal keempat 2024, smelter tersebut masih dalam tahap persiapan operasional dan dijadwalkan untuk mulai memproduksi pada kuartal kedua 2025²³.

Pada tahun 2024 PT. Vale Indonesia Tbk (INCO) telah menandatangani kerja sama dengan GEM Co Ltd untuk pembangunan smelter dengan teknologi *high pressure aic leaching* (HPAL) senilai US\$1,4 miliar. Proyek smelter ini berlokasi di Sulawesi Tengah dan bertujuan untuk menjadi pabrik pengolahan nikel dengan produksi kurang lebih 60.000 ton nikel dalam bentuk *mixed hydroxide precipitate* (MHP) per tahun, yang merupakan komponen penting untuk baterai sistem penyimpanan energi atau ESS. Sebelumnya, PT. Vale Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan China dalam pembangunan smelter. Beberapa diantaranya adalah tambang nikel dan HPAL Sorowako (bekerja sama dengan Huayou), tambang nikel dan HPAL Pomalaa (bekerja sama dengan Huayou dan Ford Motor Co), Tambang nikel dan RKEF Bahodopi (bekerja sama dengan Xinhai dan Tisco)²⁴. Semenjak diberlakukannya pelarangan ekspor bijih nikel, semakin banyak perusahaan tambang yang melakukan kerja sama dengan Tiongkok, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas investasi asing dalam bidang nikel berasal dari Tiongkok.

Pada September 2023, pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Korea Selatan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV). Penandatanganan MoU ini dilakukan saat kunjungan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, ke Indonesia dalam rangka merayakan 50 tahun hubungan bilateral antara kedua negara. Dalam perjanjian ini, kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam pengembangan infrastruktur industri, penyediaan fasilitas pengisian daya dan pemeliharaan kendaraan listrik, serta pelatihan dan pertukaran tenaga kerja untuk pemeliharaan, manufaktur, dan penelitian terkait ekosistem EV. Fokus utama kerja sama ini juga mencakup peningkatan sistem dan kebijakan untuk memperluas mobilitas listrik. Salah satu keunggulan utama baterai berbasis nikel adalah kapasitas energinya yang lebih tinggi²⁵. Kerja sama ini diimplementasikan salah satunya melalui proyek Grand Package Konsortium LG. Dengan menjalin kemitraan dengan negara yang memiliki teknologi dan modal besar serta diakui di pasar internasional, hal ini tentunya akan mendukung kebijakan hilirisasi yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dalam negeri. Pada 3 Juli 2024, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korea Selatan di Indonesia, yang berlangsung di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat.

Selain dengan Tiongkok dan Korea Selatan, Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Australia melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), yang aktif sejak tahun 2020.

Perjanjian ini mencakup tidak hanya perdagangan barang, jasa, dan investasi, tetapi juga berbagai bentuk kerjasama ekonomi lainnya, termasuk dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Vokasional (VET), pendidikan tinggi, penanaman modal, serta sektor-sektor ekonomi lainnya²⁶. Pada 4 Juli 2023, dalam acara dan kunjungan presiden Indonesia ke Australia untuk pertemuan tahunan dengan PM Australia, terjadi penandatanganan Rencana Aksi untuk implementasi MoU yang dilakukan oleh Perdana Menteri Australia Barat Hon Roger Cook MLA dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Umum (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid. Rencana Aksi ini merujuk pada kerja sama *critical minerals* untuk periode 2023-2025. Kolaborasi dilaksanakan dengan mengedepankan semangat *economic powerhouse* yang menjadi bagian dari visi IA-CEPA²⁷. Setelah itu, pada akhir tahun 2023, Australia dan Indonesia sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang manufaktur baterai, pemrosesan mineral penting, serta aspek lain dari ekosistem kendaraan listrik. Di mana MoU pembentukan kolaborasi EV tersebut ditandatangani ketika Menteri Industri dan Ilmu Pengetahuan Australia melakukan kunjungan ke Jakarta²⁸.

Hilirisasi sebagai Strategi Pembangunan Nasional

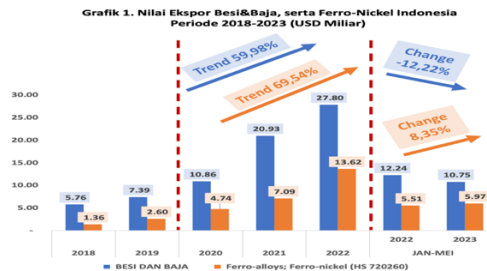
Implementasi hilirisasi industri nikel dilakukan melalui percepatan pembangunan smelter dan peningkatan kapasitas pengolahan mineral di dalam negeri. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun 2024 Indonesia memiliki total 190 smelter yang dalam berbagai tahap pembangunan. Dari jumlah tersebut, 50 smelter telah aktif beroperasi, sedangkan 120 lainnya masih dalam tahap konstruksi, dan 16 smelter sedang dalam perencanaan²⁹. Selain menghasilkan produk turunan seperti *ferronickel* dan *nickel matte*, hilirisasi juga memungkinkan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik dan energi baru terbarukan. Secara struktural, hal ini akan memperkuat perekonomian domestik dan meminimalisir ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Berdasarkan pembangunan berkelanjutan, hilirisasi nikel juga dikaitkan dengan transisi menuju ekonomi hijau. Di mana produk turunan nikel juga bisa digunakan dalam industri baterai lithium-ion, yang menjadi komponen utama kendaraan listrik dan penyimpanan energi bersih. Melalui Perpres No. 55 Tahun 2019 mengenai Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik, pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen utama baterai EV di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian hilirisasi bukan hanya berfungsi sebagai alat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga strategi untuk mewujudkan keberlanjutan yang sejalan dengan komitmen iklim nasional.

Hilirisasi nikel mencerminkan upaya negara untuk melindungi aset strategis dan mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini,

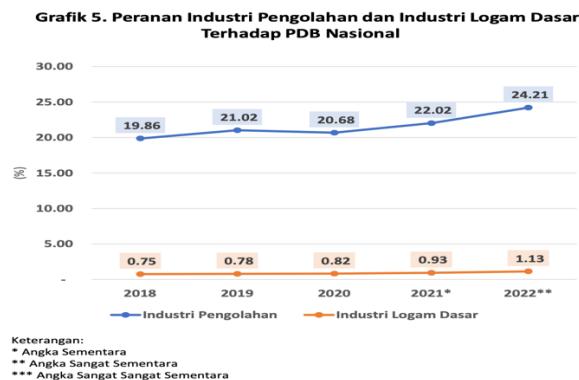
negara berperan aktif dalam mengintervensi pasar melalui kebijakan industri demi menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang, seperti peningkatan PDB, penciptaan lapangan kerja baru, serta transfer teknologi. Kepentingan nasional bukan hanya soal keamanan fisik atau politik, tetapi juga mencakup kapasitas ekonomi dan kemandirian dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Gambar 1



Sumber: BPS (diolah PDSI Kementerian Perdagangan)³⁰

Gambar 2



Sumber: BPS (diolah PDSI Kementerian Perdagangan)³¹

Sejak diberlakukannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2020, dampak positif terhadap kinerja ekspor Indonesia mulai terlihat secara signifikan. Pada gambar 1 menunjukkan bahwa periode 2020-2022 mencatat lonjakan ekspor besi dan baja sebesar 59,98%, sementara ekspor ferro-nikel meningkat lebih tinggi, yaitu sebesar 69,54 dibandingkan dengan capaian tahun 2018-2019. Meskipun terjadi penurunan ekspor besi dan baja sebesar 12,22% pada Januari-Mei 2023, ekspor ferro-nikel tetap tumbuh sebesar 8,35%, bahkan berkontribusi hingga 55,59% terhadap total ekspor besi dan baja pada periode tersebut.

Pada gambar 2 bisa dilihat bahwa sebelum kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan, kontribusi sektor pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat sebesar 19,86% pada 2018 dan 21,02% pada 2019. Meskipun pada 2020 kontribusinya sempat turun menjadi 20,68%, sektor ini meningkat pada 2021 dan 2022 mencapai 22,02% dan 24,21%. Sementara itu industri logam dasar memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 0,75% (2018) dan 0,78% (2019), kemudian meningkat secara signifikan setelah kebijakan larangan ekspor nikel diterapkan, menjadi 0,82% (2020), 0,93% (2021), dan 1,13% (2022). Berdasarkan data ini, kebijakan larangan ekspor bijih nikel terbukti efektif dalam meningkatkan ekspor produk turunan nikel dan memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan serta memperkuat sektor hilirisasi.

Namun demikian, pelaksanaan hilirisasi juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah dominasi investor asing, terutama dari China, yang mana negara ini telah mendominasi penguasaan smelter dan teknologi pemurnian. Hal ini menunjukkan potensi munculnya bentuk baru ketergantungan, yakni bukan lagi pada ekspor bahan mentah, melainkan pada modal dan teknologi asing dalam proses hilirisasi. Tantangan lainnya adalah terbatasnya tenaga kerja lokal yang memiliki keahlian teknis dalam industri pengolahan. Untuk itu, diperlukan kebijakan pelatihan vokasi dan transfer teknologi yang konsisten serta penguatan kapasitas industri nasional.

Tantangan Global: Gugatan Uni Eropa di WTO

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan hilirisasi nikel adalah gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa melalui WTO. Gugatan ini berawal setelah adanya kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang dianggap oleh Uni Eropa sebagai pelanggaran prinsip-prinsip perdagangan bebas dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), khususnya pasal XI mengenai pelarangan pembatasan ekspor kuantitatif³². Di mana Uni Eropa berpendapat bahwa kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia akan merugikan negara-negara pengimpor. Uni Eropa menilai bahwa kebijakan hilirisasi nikel Indonesia dapat memicu kenaikan harga nikel global, yang tentunya dapat merugikan industri baja Uni Eropa yang bergantung pada impor bijih nikel mentah dari Indonesia. Uni Eropa juga menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia tersebut dapat memicu adanya perlombaan kebijakan proteksionisme di antara negara-negara lain³³.

Indonesia merespon gugatan Uni Eropa dengan menyampaikan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel adalah bagian dari strategi pembangunan nasional untuk mengoptimalkan nilai tambah produk nikel serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Pemerintah Indonesia sendiri telah menekankan bahwa kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan

Pasal XX GATT yang memberikan pengecualian untuk alasan perlindungan terhadap sumber daya alam yang tak terbarukan³⁴. Pada tahun 2021, WTO membentuk panel untuk mengevaluasi legalitas kebijakan yang diterapkan Indonesia. Putusan panel tersebut menyatakan bahwa kebijakan Indonesia bertentangan dengan ketentuan GATT. Keputusan ini mendapat kritik dari berbagai pihak di Indonesia karena dianggap mengabaikan hak negara berkembang dalam mengembangkan industri domestik dan mengelola sumber daya alam untuk kepentingan jangka panjang. Sebagai respons terhadap hal ini, pemerintah Indonesia mengajukan banding. Namun, hingga saat ini, proses banding tersebut belum memperoleh keputusan final karena terjadinya kebuntuan dalam badan banding WTO³⁵. Meski demikian, Indonesia mendapatkan dampak positif terkait dengan belum dikeluarkannya keputusan final tersebut. Hal ini dikarenakan tanpa adanya keputusan final, maka Indonesia masih tetap dapat melanjutkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel³⁶.

Jika dianalisa menggunakan teori ketergantungan, sikap Indonesia menunjukkan upaya untuk melepaskan diri dari struktur ekonomi global yang menempatkan negara berkembang sebagai pemasok bahan mentah dan bergantung pada harga pasar internasional yang tidak stabil. Jika dianalisis menggunakan teori ketergantungan juga menunjukkan bahwa gugatan Uni Eropa mencerminkan adanya struktur ketimpangan dalam sistem perdagangan internasional. Di mana negara-negara maju seperti Uni Eropa ingin mempertahankan akses atas bahan mentah murah dari negara berkembang agar tetap unggul dalam sektor industri berteknologi tinggi. Dengan demikian, langkah Indonesia melakukan kebijakan hilirisasi dan melarang ekspor bijih nikel dipandang sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi global dan sebagai upaya untuk membangun struktur ekonomi yang lebih mandiri dan berdaulat.

Sikap tegas Indonesia dalam menghadapi gugatan WTO dilakukan semata-mata untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Kepentingan ini meliputi upaya menjaga sumber daya alam nasional serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tetap mempertahankan kebijakan ini meskipun menghadapi tekanan internasional. Meskipun gugatan WTO menjadi tekanan tersendiri bagi Indonesia, dampak dari gugatan tersebut masih tergolong minim. Di mana Indonesia juga masih tetap dapat melanjutkan kebijakan hilirisasi nikel hingga saat ini dan menegaskan komitmennya untuk tidak mencabut larangan ekspor serta tetap melanjutkan agenda industrialisasi. Bahkan, beberapa negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan terus meningkatkan investasinya di sektor hilir Indonesia.

Kesimpulan

kebijakan hilirisasi nikel Indonesia melalui larangan ekspor bijih nikel merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri. Dari tahun 2020 sejak diberlakukannya kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel sampai tahun 2024, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya diplomasi ekonomi untuk mendorong perkembangan industri hilirisasi nikel. Dengan mengacu pada 4 tahapan diplomasi ekonomi yang disampaikan Rana (2013), sangat terlihat sekali jika Indonesia giat melakukan diplomasi ekonomi dalam kurun waktu tersebut. Dalam tahap pertama (*Economic Salesman*), pemerintah Indonesia kerap kali menghadiri *conference* atau *event* di negara lain dengan tujuan mempromosikan produk nikelnya. Selain itu, pemerintah Korea Selatan dan Indonesia telah melakukan pertemuan bilateral dengan tujuan yang sama. Di mana kedua negara sepakat untuk menjalin kerja sama dalam mendalami pengembangan investasi turunan nikel. Kemudian pada tahap selanjutnya (*Economic Networking and Advocacy*) diplomasi ekonomi lebih banyak dilakukan dengan menggandeng badan swasta. Dalam tahapan ini, badan swasta (APNI dan NBRI) kerap kali menyelenggarakan *conference* dan pameran yang mengusung tema tentang nikel dan produk turunannya. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk memperkuat hubungan dagang Indonesia dengan mitra dagangnya, dan sebagai sarana mencari investasi asing lainnya. Tahapan selanjutnya adalah *Image Building*, yang mana image atau citra suatu negara akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi negara tersebut. Bagi negara berkembang, tujuan utama dari *image building* adalah agar mereka mendapatkan perhatian dan diakui oleh negara lain. Dalam konteks ini, keberhasilan pemerintah Indonesia untuk memasukkan nikel RI di bursa komoditas logam *London Metal Exchanget* (LME) merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia untuk melakukan *image building*. Di mana dengan keberhasilan ini, maka kualitas nikel Indonesia telah diakui secara global dan menandakan bahwa Indonesia bukan hanya negara penghasil bahan mentah, tetapi juga produsen barang olahan yang memiliki standar internasional. Selain itu, keberhasilan dan ketegasan Indonesia dalam mempertahankan kebijakan larangan ekspor bijih nikel juga bisa dianggap sebagai salah satu usaha Indonesia untuk membangun citranya, yang mana hal ini dilakukan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Sementara itu, pada tahapan terakhir (*Regulatory Management and Resource Mobilization*) lebih fokus pada terjadinya kesepakatan dan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan tambang. Meski demikian, dominasi investor asing dalam sektor hilir nikel juga bisa menimbulkan efek negatif. Kondisi ini bisa mengakibatkan terbentuknya ketergantungan baru terhadap modal dan teknologi asing. Meskipun Indonesia telah lepas dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, dominasi modal asing dalam sektor pengolahan dapat menciptakan ketergantungan dalam bentuk baru.

Referensi

- Al Hasan, Andi. "OJK Serukan Pembangunan Tata-tatanan Multilateral yang Adil." *TEMPO*, Juli 08, 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-serukan-pembangunan-tatanan-multilateral-yang-adil-42218>.
- AHL. "Indonesia Raup Untung Rugi dari Banding Nikel di WTO." Kementerian Perdagangan RI. Diakses 1 Juni 2025. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/indonesia-raup-untung-dari-banding-nikel-di-wto>.
- Ardian, Dimas. "Vale Gandeng GEM dari China Bangun Smelter Nikel," *Bloomberg Technoz*, Diakses 30 Mei 2025. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/54663/vale-gandeng-gem-dari-china-bangun-smelter-nikel-hpal-baru-rp22-t/2>.
- Asnawi, M. Iqbal et all., "Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Bijih Nikel Indonesia Terhadap Gugatan Uni Eropa di GATT/WTO." *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 4, Issue 1 (April 2025): 49. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/419>.
- CNN Indonesia. "Nikel RI Masuk Bursa Global, Apa Dampaknya?," CNN Indonesia, Oktober 31, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241030143209-85-1161216/nikel-ri-masuk-bursa-global-apa-dampaknya>.
- Elisabeth, Adriana, Agus Syarip, Athiqah Nur, Ganewati Wuryandari, M. Riefqi Muna, and C.P.F. Luhulima. Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2020): Mewujudkan Diplomasi Ekonomi Inklusif, Berbasis Lingkungan Berkelanjutan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Hadad, Hanina Husin et all., "Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Di Antara Stabilitas Perdagangan Internasional." *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol 34, No. 2 (Desember 2022): 561-562. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.2686>.
- Hutagalung, Karlos Domingo et all., "Sengketa Perdagangan Dan Hukum Lingkungan: Dampak Kebijakan Energi Hijau Terhadap Negara Berkembang (Studi Kasus Gugatan Uni Eropa di WTO Akibat Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Indonesia)." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 1. No. 3 (April-Juni 2025): 174. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/view/392/401>.
- Hilmi, Prabowo, and Hadi Rahmat Purnama. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Larangan Ekspor Nikel Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIII, No. 1 (Juni 2024): 43-44, <https://journal.ubb.ac.id/progresif/article/view/4209/2503>.
- Husaini, Aziz. "Selesai Bangun Smelter Nikel di Kaltim, MMP Siap Produksi Komersial di Akhir Tahun 2025." *Kontan News Data Financial Tools*, Juni 04, 2025. <https://industri.kontan.co.id/news/selesai-bangun-smelter-nikel-di-kaltim-mmp-siap-produksi-komersial-di-akhir-2025>.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Apa Sih Ekspor Itu?". *Kemenkeu Learning Center*. Diakses 25 Mei, 2025. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/apa-sih-ekspor-itu-237a6ca8/detail/>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "The Second Meeting of The Joint Committee on Economic Cooperation (JCEC-2) Republik Indonesia-Republik Korea." *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Diakses 25 Mei, 2025. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5273/the-second-meeting-of-the-joint-committee-on-economic-cooperation-jcec-2-republik-indonesia-republik-korea>.
- Kedutaan Besar Australia Indonesia. "Indonesia dan Australia Mitra dalam Kendaraan Listrik." *Indonesian Embassy*. Diakses 25 Mei, 2025. https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM23_069.html.
- Kemenko Perekonomian RI. 2023. "Menko Airlangga: Pentingnya Mewujudkan Indonesia-Australia sebagai Pemain Utama 'Global Value Chains' Baterai dan Mineral Penting (Critical Minerals)." *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Diakses 26 Mei, 2025. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5234/menko-airlangga-pentingnya-mewujudkan-indonesia-australia-sebagai-pemain-utama-global-value-chains-baterai-dan-mineral-penting-critical-minerals>.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Realisasi Ekspor Ferro-Nickel Indonesia Periode 2018-2023 (Januari-Mei) dan Peranan Terhadap PDB Nasional." Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal. Diakses 25 Mei, 2025. <https://www.google.com/search?q=About+https://satudata.kemendag.go.id/ri-ngkasan/produk/realisasi-ekspor-ferro-nickel-indonesia-periode-2018-2023-januari-mei-dan-peranan-terhadap-pdb-nasional&tbm=ilp&ctx=atr&sa=X&ved=2ahUKEwiDufy8q5eOAXZo2MGHWPaf8cQv5AHegQIABAD>.
- Khairunnissa, Siti. "Analisis Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Terhadap Ekspor Produk Pertanian Indonesia." *LDJR Law, Development & Justice Review* Vol. 7. No. 3 (Desember 2024):215. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.213-231>.
- Litbang Kompas. Ekspansi Nikel di Sulawesi Tenggara. *Penerbit Buku Kompas*, 2024.
- Lauri, Myllyvirta et al., "Membantah Mitos Nilai Tambah. Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel." *Centre for Research on Energy and Clean Air (CELIOS)*. (Februari 2024); 13. https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2024/02/CREA_CELIOS-Indonesia-Nickel-Development_ID.pdf.
- Lestari, Aninda. "Dewan Penasihat Pertambangan APNI: Hilirisasi Harus Mendorong UMKM," *Media Nikel Indonesia*. Diakses 28 Mei, 2025. <https://nikel.co.id/2024/05/16/dewan-penasehat-pertambangan-apni-hilirisasi-harus-mendorong-umkm/>.
- Litbang Kompas. Kebijakan Pemerintah Terkait Hilirisasi Pertambangan. *Penerbit Buku Kompas*, 2024.

- Mardhiyyah, Iasya, and Dadan Suryadipura. "Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pada Masa Kabinet Kerja 2014-2019." *Padjajaran Journal of International Relations* Vol. 5, No. 1 (Januari 2023): 5-6.
- Media Nikel Indonesia. "Nanan Soekarno Buka Konferensi Bergengsi Bahas Nikel dan Cobalt." Diakses 28 Mei, 2025. <https://nikel.co.id/2023/05/30/nanan-soekarno-buka-konferensi-bergengsi-bahas-nikel-dan-cobalt/>.
- Muhibat, Shafiah F, and Rocky Intan. "Definisi dan Pemetaan Diplomasi Ekonomi Indonesia: Analisa Perjanjian Ekonomi Internasional, Forum Internasional, dan Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi di Masa Pandemi." *Laporan Riset CSIS Indonesia*, (2020): 3-5, [https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/Definisi dan Pemetaan Diplomasi Ekonomi Indonesia .pdf?download=1](https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/Definisi%20dan%20Pemetaan%20Diplomasi%20Ekonomi%20Indonesia.pdf?download=1)
- National Battery Research Institute. "International Battery Summit 2023: The First International Battery Summit in Indonesia." Diakses 29 Mei, 2025. <https://www.n-bri.org/news/international-battery-summit-2023-the-first-international-battery-summit-in-indonesia>.
- Pawito. Penelitian Komunikasi Kualitatif. LKIS, 2008.
- Pramudyani, Yashinta Difa. "Indonesia-Korea Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik Masa Depan." *Antara News*, November 09, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3815913/indonesia-korea-kembangkan-ekosistem-kendaraan-listrik-masa-depan>.
- Santoso, Rizal Budi et al., "Pilihan Rasional Indonesia dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel." *Indonesian Perspective* Vol 8, No. 1 (Januari-Juni 2023): 155. <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56383>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Pembukaan Hannover Messe 2021, 12 April 2021, dari Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Diakses 30 Mei, 2025. <https://setkab.go.id/pembukaan-hannover-messe-2021-12-april-2021-dari-istana-negara-provinsi-dki-jakarta/>.
- Media Nikel Indonesia. "Kementerian ESDM: Pembangunan Smelter Indonesia Meningkatkan dengan Target Hilirisasi Maksimal." Diakses 30 Mei, 2025. <https://nikel.co.id/2024/10/30/kementerian-esdm-pembangunan-smelter-indonesia-meningkat-dengan-target-hilirisasi-maksimal/#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Koordinasi%20Penanaman,16%20smelter%20sedang%20dalam%20perencanaan>.
- Wicaksono, Arif. "Perusahaan Tiongkok Jadi Kontraktor Proyek Smelter Nikel di Kalimantan Timur." *Metrotv News*, Juli 25. 2023. [https://www.metrotvnews.com/read/NAOCXWlr-perusahaan-tiongkok-jadi-kontraktor-proyek-smelter-nikel-di-kalimantan-timur#:~:text=Dekat%20dengan%20IKN,%2C%20Social%2C%20Governance\)%20ESG](https://www.metrotvnews.com/read/NAOCXWlr-perusahaan-tiongkok-jadi-kontraktor-proyek-smelter-nikel-di-kalimantan-timur#:~:text=Dekat%20dengan%20IKN,%2C%20Social%2C%20Governance)%20ESG).

-
- ¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Apa Sih Ekspor Itu?," *Kemenkeu Learning Center*, Juli 06, 2023, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/apa-sih-ekspor-itu-237a6ca8/detail/>
- ² Litbang Kompas, *Ekspansi Nikel di Sulawesi Tenggara* (Penerbit Buku Kompas, 2024), 21.
- ³ Myllyvirta Lauri et al., "Membantah Mitos Nilai Tambah. Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel," *Centre for Research on Energy and Clean Air (CELIOS)*, 2024: 13. https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2024/02/CREA_CELIOS-Indonesia-Nickel-Development_ID.pdf
- ⁴ Litbang Kompas, *Kebijakan Pemerintah Terkait Hilirisasi Pertambangan* (Penerbit Buku Kompas, 2024), 16.
- ⁵ Prabowo Hilmi and Hadi Rahmat Purnama, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Larangan Ekspor Nikel Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIII, No. 1 (2024): 43-44, <https://journal.ubb.ac.id/progresif/article/view/4209/2503>
- ⁶ Adriana Elisabeth et al., *Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2020): Mewujudkan Diplomasi Ekonomi Inklusif, Berbasis Lingkungan Berkelanjutan*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 3.
- ⁷ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (LKIS, 2008), 35.
- ⁸ Shafiah F. Muhibat and Rocky Intan, "Definisi dan Pemetaan Diplomasi Ekonomi Indonesia: Analisa Perjanjian Ekonomi Internasional, Forum Internasional, dan Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi di Masa Pandemi," *Laporan Riset CSIS Indonesia*, (2020): 3-5, [https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/Definisi dan Pemetaan Diplomasi Ekonomi Indonesia.pdf?download=1](https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/Definisi%20dan%20Pemetaan%20Diplomasi%20Ekonomi%20Indonesia.pdf?download=1)
- ⁹ Iasya Mardhiyyah and Dadan Suryadipura, "Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pada Masa Kabinet Kerja 2014-2019," *Padjajaran Journal of International Relations* Vol. 5, No. 1 (2023): 5.
- ¹⁰ Mardhiyyah and Suryadipura, "Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok," 5.
- ¹¹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pembukaan Hannover Messe 2021, 12 April 2021, dari Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, April 12, 2021, <https://setkab.go.id/pembukaan-hannover-messe-2021-12-april-2021-dari-istana-negara-provinsi-dki-jakarta/>.
- ¹² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "The Second Meeting of The Joint Committee on Economic Cooperation (JCEC-2) Republik Indonesia-Republik Korea," *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, Juli 26, 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5273/the-second-meeting-of-the-joint-committee-on-economic-cooperation-jcec-2-republik-indonesia-republik-korea>.
- ¹³ Andi Al Hasan, "OJK Serukan Pembangunan Tata-tatanan Multilateral yang Adil," *TEMPO*, Juli 8, 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-serukan-pembangunan-tatanan-multilateral-yang-adil-42218>.
- ¹⁴ Mardhiyyah and Suryadipura, "Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok," 5-6.
- ¹⁵ Media Nikel Indonesia, "Nanan Soekarno Buka Konferensi Bergengsi Bahas Nikel dan Cobalt," *Media Nikel Indonesia*, Mei 30, 2023, <https://nikel.co.id/2023/05/30/nanan-soekarno-buka-konferensi-bergengsi-bahas-nikel-dan-cobalt/>.
- ¹⁶ Aninda Lestari, "Dewan Penasihat Pertambangan APNI: Hilirisasi Harus Mendorong UMKM," *Media Nikel Indonesia*, Mei 16, 2024, <https://nikel.co.id/2024/05/16/dewan-penasehat-pertambangan-apni-hilirisasi-harus-mendorong-umkm/>.
- ¹⁷ NBRI, "International Battery Summit 2023: The First International Battery Summit in Indonesia," National Battery Research Institute, Agustus 16, 2023, <https://www.n-bri.org/news/international-battery-summit-2023-the-first-international-battery-summit-in-indonesia>.
- ¹⁸ Mardhiyyah and Suryadipura, "Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok", 5-6.

¹⁹ CNN Indonesia, "Nikel RI Masuk Bursa Global, Apa Dampaknya?," CNN Indonesia, Oktober 31, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241030143209-85-1161216/nikel-ri-masuk-bursa-global-apa-dampaknya>.

²⁰ Mardhiyyah and Suryadipura, "Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok", 5-6.

²¹ Sucofindo, "Cara Kerja Smelter," Diakses 30 Mei 2025, <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/pertanian/pengujian-dan-analisis/cara-kerja-smelter/>.

²² Arif Wicaksono, "Perusahaan Tiongkok Jadi Kontraktor Proyek Smelter Nikel di Kalimantan Timur," Metrotv News, Juli 25, 2023, [https://www.metrotvnews.com/read/NA0CXWlr-perusahaan-tiongkok-jadi-kontraktor-proyek-smelter-nikel-di-kalimantan-timur#:~:text=Dekat%20dengan%20IKN,%2C%20Social%2C%20Governance\)%20ESG](https://www.metrotvnews.com/read/NA0CXWlr-perusahaan-tiongkok-jadi-kontraktor-proyek-smelter-nikel-di-kalimantan-timur#:~:text=Dekat%20dengan%20IKN,%2C%20Social%2C%20Governance)%20ESG).

²³ Aziz Husaini, "Selesai Bangun Smelter Nikel di Kaltim, MMP Siap Produksi Komersial di Akhir Tahun 2025," Kontan News Data Financial Tools, Juni 18, 2025, <https://industri.kontan.co.id/news/selesai-bangun-smelter-nikel-di-kaltim-mmp-siap-produksi-komersial-di-akhir-2025>.

²⁴ Dimas Ardian, "Vale Gandeng GEM dari China Bangun Smelter Nikel," Bloomberg Technoz, November 12, 2024, <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/54663/vale-gandeng-gem-dari-china-bangun-smelter-nikel-hpal-baru-rp22-t/2>.

²⁵ Yashinta Difa Pramudyani, "Indonesia-Korea Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik Masa Depan," Antara News, November 09, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3815913/indonesia-korea-kembangkan-ekosistem-kendaraan-listrik-masa-depan>.

²⁶ Siti Khairunnissa, "Analisis Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Terhadap Ekspor Produk Pertanian Indonesia," *LDJR Law, Development & Justice Review* Vol. 7, No. 3 (2024): 215, <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.213-231>.

²⁷ Kemenko Perekonomian RI, "Menko Airlangga: Pentingnya Mewujudkan Indonesia-Australia sebagai Pemain Utama 'Global Value Chains' Baterai dan Mineral Penting (Critical Minerals)," Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta:2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5234/menko-airlangga-pentingnya-mewujudkan-indonesia-australia-sebagai-pemain-utama-global-value-chains-baterai-dan-mineral-penting-critical-minerals>.

²⁸ Kedutaan Besar Australia Indonesia, "Indonesia dan Australia Mitra dalam Kendaraan Listrik," Indonesian Embassy, November 24, 2023, https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM23_069.html.

²⁹ Shiddiq, "Kementerian ESDM: Pembangunan Smelter Indonesia Meningkatkan dengan Target Hilirisasi Maksimal," *Media Nikel Indonesia*, Oktober 30, 2024, <https://nikel.co.id/2024/10/30/kementerian-esdm-pembangunan-smelter-indonesia-meningkat-dengan-target-hilirisasi-maksimal/#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Koordinasi%20Penanaman,16%20smelter%20sedang%20dalam%20perencanaan>.

³⁰ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Realisasi Ekspor Ferro-Nickel Indonesia Periode 2018-2023 (Januari-Mei) dan Peranan Terhadap PDB Nasional," Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal, <https://www.google.com/search?q=About+https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/produk/realisasi-ekspor-ferro-nickel-indonesia-periode-2018-2023-januari-mei-dan-peranan-terhadap-pdb-nasional&tbm=ilp&ctx=atr&sa=X&ved=2ahUKEwiDufy8q5eOAXZo2MGHWPaf8cQv5AHegQIABAD>.

³¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Realisasi Ekspor Ferro-Nickel Indonesia Periode 2018-2023 (Januari-Mei) dan Peranan Terhadap PDB Nasional."

³² Hanina Husin Hadad et al., "Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Di Antara Stabilitas Perdagangan Internasional," *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol 34, No. 2 (2022): 561-562, <https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.2686>.

³³ Rizal Budi Santoso et al., "Pilihan Rasional Indonesia dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel," *Indonesian Perspective* Vol 8, No. 1 (2023): 155, <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56383>.

³⁴ M. Iqbal Asnawi et al., "Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Bijih Nikel Indonesia Terhadap Gugatan Uni Eropa di GATT/WTO," *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 4, Issue 1 (2025):49, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i1.419>.

³⁵ Karlos Domingo Hutagalung et al., "Sengketa Perdagangan Dan Hukum Lingkungan: Dampak Kebijakan Energi Hijau Terhadap Negara Berkembang (Studi Kasus Gugatan Uni Eropa di WTO Akibat Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Indonesia)," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 1, No. 3 (2025): 174, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/392/401>.

³⁶ AHL, "Indonesia Raup Untung Rugi dari Banding Nikel di WTO," *Kementerian Perdagangan RI*, Desember 04, 2023, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/indonesia-raup-untung-dari-banding-nikel-di-wto>.